



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MAKASSAR, FEBRUARI 2024

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Gambaran Umum Badan Kesbangpol	2
1.2.1	Struktur Organisasi	6
1.2.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.2.3	Rencana Strategis	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1	Sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	19
3.2	Sasaran strategis meningkatnya indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	24
3.3	Sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	29
BAB IV	PENUTUP	44
A.	Kesimpulan	44
B.	Permasalahan dan Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja	45
C.	Strategi Pemecahan Masalah	45

-

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada Masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja .

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja akan memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian Laporan Kinerja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan di masa mendatang.

Makassar, Februari 2024

Pt. KEPALA BADAN KESBANGPOL



ANSYAR, S.STP., M.AP
Pangkat Pembina Tk. I
NIP. 19791205 199810 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2018-2023 dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi selatan. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Gambaran Umum Badan Kesbangpol

Berpedoman kepada UUD 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) tetapi melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UUD No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota. Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 UUD No.23 Tahun 2014 tersebut meliputi: a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul Laporan Kinerja 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak

dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Selanjutnya, pada poin (7) pasal 25 UU no.23 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, Instruksi Menteri Dalam Negeri dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.” Terkait masalah pendanaan diatur pada pasal 122 ayat (2) PP No.18 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai Tugas Menyenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berada pada aturan peralihan yang berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Dan sampai dengan saat ini peraturan perundang-undangan terkait urusan pemerintahan umum belum diundangkan. Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bab II Penetapan Kelembagaan yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pasal 2 menyatakan bahwa : Perangkat Daerah Pasal 2 Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan. Dengan demikian, hingga saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel masih berdasarkan Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 50 Tahun 2021.

Dalam rangka mensukseskan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, maka telah disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 berdasarkan RPJMD 2018-2023.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi serta merealisasikan kebijakan, tujuan dan sasaran sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis tersebut diatas, maka perlu disusun program kerja tahunan yang memuat berbagai rencana kerja operasional tahunan yang diharapkan secara akumulatif selama lima tahun dapat berkontribusi pada pencapaian sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Tahun 2023 merupakan tahun Kelima dari masa Renstra Bakesbangpol periode 2018-2023 Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua aturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Esensi dari sistem AKIP bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa pencapaian visi dan misi selaras dengan program dan kegiatan setiap tahunnya. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholders* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan kinerja tersebut merupakan cermin dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 mencakup hal berikut ini :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2023.
- Aspek Manajemen Kinerja, bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan kinerja 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.2.1 Struktur Organisasi

Dalam pembahasan ini diuraikan gambaran singkat organisasi yang memuat sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, pembinaan staf serta pengaruh kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal).

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut tingkat pendidikan :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat		2		5	3	2	4	
2	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1	1					3	5
3	Bidang Bidang Politik Dalam Negeri				2		2	2	6
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan		1		1	3	1	2	8
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		1		2	1	1	2	7
TOTAL		1	5	0	10	7	6	15	44

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	16	2	19
2	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa			3	2	5
3	Bidang Bidang Politik Dalam Negeri		1	1	3	6
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan		1	6	1	8
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik			6	1	7
TOTAL			3	32	9	44

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	3	3	11	1	1	19
2	Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1		2	2		5
3	Bidang Bidang Politik Dalam Negeri	1		1	3		5
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	1		6	1		8
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan			5	2		7
TOTAL		6	3	25	9	1	44

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Eselonering

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	7
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	28
	Jumlah	44

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Menurut Eselonering dan jenis kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	2	3	5
3	Eselon IV		3	3
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	2	5	7
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	13	15	28
	Jumlah	17	27	44

Secara keseluruhan, komposisi jabatan menurut Eselon dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|--|---|---|-------|
| a. Eselon II | = | 1 | Orang |
| b. Eselon III | = | 5 | Orang |
| c. Eselon IV | = | 3 | Orang |
| d. Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) | = | 7 | Orang |

1.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

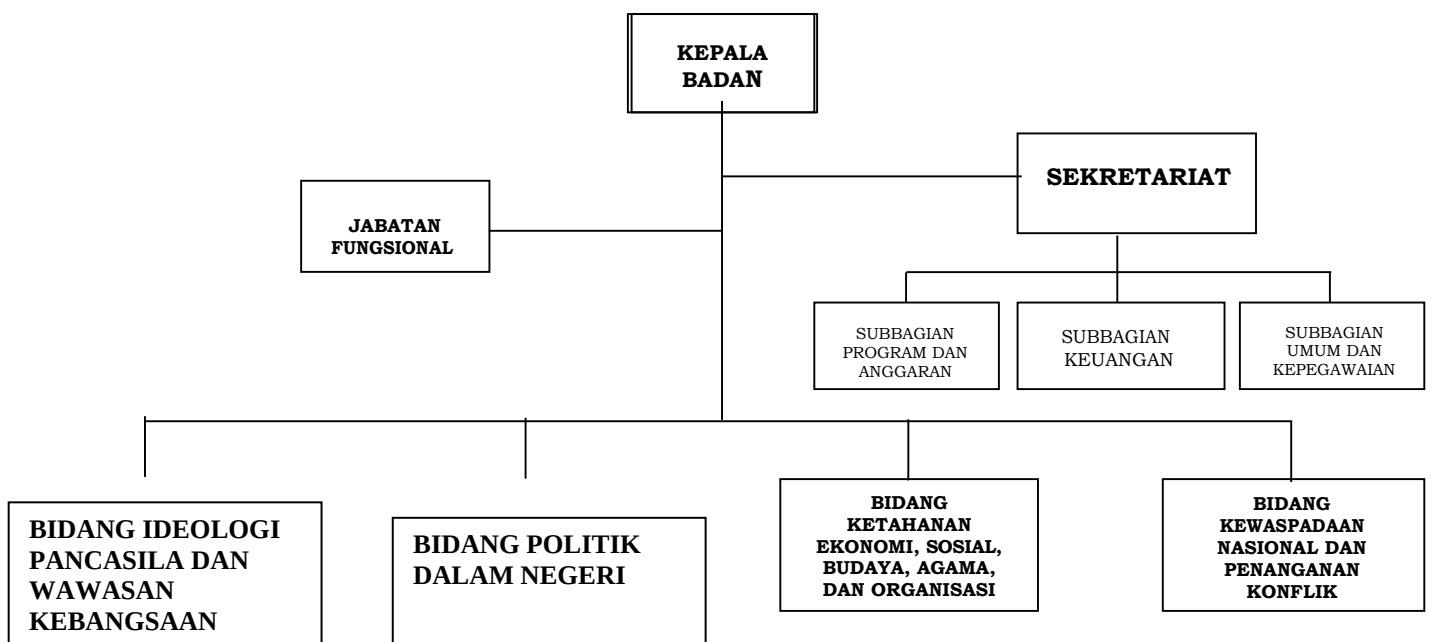
- 1. Kedudukan** : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2. Tugas Pokok** : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas desentralisasi, demokrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah.
- 3. Fungsi** :
 1. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa meliputi pengembangan nilai – nilai kebangsaan, Organisasi politik dan kemasyarakatan dan ketahanan nasional
 2. pengoordinasian penyusunan perencanaan kesatuan bangsa meliputi pengembangan Nilai – nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan serta ketahanan nasional
 3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa meliputi penegmbangan nilai – nilai kebangsaan, organisasi politik dan kemasyarakatan, serta ketahanan nasional
 4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

➤ Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021, tanggal 29 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, meliputi:
 1. Subbagian Program dan Anggaran;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
- d. Bidang Politik Dalam Negeri,
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan,
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



1.2.3 RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Visi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan berkarakter, Tujuan dan sasaran Badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sulawesi Selatan terjabarkan ke dalam misi 1 dan misi 4 yang berbunyi : 1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif dan misi 4 Mewujudkan Kualitas Manusia yang kompetitif, inklusif dan Berkarakter.

Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- a. Mewujudkan Sulawesi Selatan yang aman, damai dan demokratis.
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

1. Sasaran

Untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan hasil yang diharapkan yaitu sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat.
- b. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan.
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran strategis yang ingin dicapai beserta program yang mendukungnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel I.1
Sasaran dan Program

No.	S a s a r a n	P r o g r a m
1.	Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat.	a. program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial b. program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya Ketahanan Ekonomi Daerah d. program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
2	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan	a. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	a. program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh sebab itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan sejumlah kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan komunikasi, konsultasi, koordinasi dengan stakeholder maupun instansi terkait lainnya.
2. Melakukan pemantauan / mencari informasi langsung ke lapangan.
3. Melaksanakan seminar, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.

4. Membuat seminar dialog dan pelatihan pemahaman kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga dapat meningkatkan integrasi, persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Memberdayakan masyarakat dalam upaya membantu pemerintah memberikan pemahaman guna meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Menyiapkan dokumen perencanaan dan penganggaran serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja maupun keuangan baik yang berbasis IT maupun manual
7. Melakukan administrasi kepegawaian, penatausahaan dan pengadaan barang untuk mendukung tupoksi Badan Kesbangpol Prov. Sulsel.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan di masa depan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan secara terus-menerus. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Kesbangpol Prov. Sulsel untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan dimana perubahan ke arah perbaikan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan nilai manfaat.

Perencanaan Strategis (*strategic action plan*), dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	100
2.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	71,79
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	- Nilai SAKIP OPD - Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) - Nilai Temuan Material LHP yang di selesaikan (%)	95 95 100%

Adapun rincian program dan kegiatan berdasarkan 3 sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat meliputi 4 Program dan 4 kegiatan Yaitu:

No.	Program	Kegiatan	Indikator
1.	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pemetaan Konflik Wilayah
			Jumlah Laporan Pengawasan dan pemantauan Orang Asing NGO dan lembaga asing
			Jumlah Laporan Koordinasi Tiga Pilar Bangdes Mantra
			Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian Trantibmas
			Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian unjuk rasa
			Jumlah Objek yang membutuhkan pengamanan
			Jumlah Laporan Forum Kewaspadaan Dini Daerah Prov. Sulsel
			Jumlah peserta rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah
			Jumlah Laporan Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa
			Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
2.	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Gerakan Bela Negara
			jumlah laporan pembinaan ideologi, karakter, dan wasbang
			jumlah laporan forum pembauran kebangsaan (FPK)

			jumlah laporan pemantapan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah
3.	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah laporan pemetaan potensi kerawanan terhadap kerukunan umat beragama dan multi etnis
			Jumlah Peserta Dialog publik peningkatan ketahanan lembaga usaha ekonomi kab/kota
			Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah
			Jumlah laporan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
			Jumlah Laporan Satgas Kontra terorisme, radikalisme dan narkoba
4.	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Usulan Surat Keterangan Terdaftar yang Dikelola

2. Sasaran kedua yaitu : Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan meliputi :

No.	Program	Kegiatan	Indikator
1.	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di Sulsel
			Jumlah Peserta Pendidikan Politik Masyarakat
			Jumlah Laporan Bantuan Keuangan Parpol
			jumlah Pertemuan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia

3. Sasaran ketiga yaitu : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah meliputi 1 program dan 7 kegiatan yaitu :

No.	Program	Kegiatan	Indikator
1.	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu.
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% persentase penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu.
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Barang Milik Daerah yang terdata dengan baik.
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Rata-Rata Nilai Prilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja.
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Kantor.
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	% Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mengukur kinerja, indikator yang digunakan adalah indikator sasaran strategis dan indikator kegiatan 2023. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah yang menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Untuk Laporan Kinerja Tahun 2023, pengukuran kinerja keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan memanfaatkan data base kinerja. Data base kinerja ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja 2 sumber yaitu :

1. Data internal yang diperoleh oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Data eksternal yang berasal dari luar lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.

• Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Hingga akhir tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan Rencana Strategis pada Tahun ke-5 yaitu tahun 2023. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Adapun pengukuran ke 3 sasaran strategis tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	100
2.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sulsel	71,79
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	- Nilai SAKIP OPD - Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) - Nilai Temuan Material LHP yang di selesaikan (%)	100 100 100%

3.1. Sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat

3.1.1. Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN 2023
Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	100	100 %	100 %

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Adapun hasil capaian Untuk tahun 2023 target pada sasaran ini sebesar 100 % Jumlah Persentase Potensi konflik yang tertangani sampai dengan akhir 2023 badan kesatuan bangsa dan politik berhasil mencapai realisasi capaian kinerja hasil ini didapat dari Realisasi 2023 dibagi Target capaian kinerja target dinyatakan bagus karena persentase potensi konflik yang tertangani semua dapat ditangani dengan baik. Hal ini bisa kami capai berkat koordinasi dan sinergi yang baik antara anggota Forkopimda dan

Stackeholder, ini terbukti dengan keberhasilan Badan kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan 15 kali Rapat

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	satuan	Target	Realisasi				
			2023	2022	2019	2020	2021
Persentase potensi konflik yang tertangani	persentase	100	100	100	100	80 kasus	21 Kasus

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Untuk analisis ini capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik persentase potensi konflik yang tertangani (2023) telah terealisasi sebesar 100 jika dibandingkan di tahun 2022 realisasi yang telah di capai juga sebesar 100 dan di tahun 2019 juga sebesar 100 sedangkan di tahun 2020 ada perubahan indicator menjadi jumlah Konflik sosial yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik, dengan realisasi sebesar 80 kasus dan ditahun 2020 berhasil menekan angka kasus sebesar 21 kasus dan berubahnya lagi indicator seperti table yang diatas menjadi persentase.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2023	Tingkat pencapaian
Persentase potensi konflik yang tertangani	persentase	100 %	100 %	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan Persentase potensi konflik yang tertangani sebesar 100% akan tetapi sampai dengan akhir 2023 Persentase potensi konflik yang tertangani dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

3.1.4. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Standar nasional	Capaian
1.	Meningkatnya keamanan dan ketentaraman Masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	Persentase	100%		-

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

3.1.5. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder antara lain TNI,POLRI, dan Badan Intelijen Daerah.
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota.
- Melaksanakan rapat forkopimda dan kominda
- Melaksanakan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan kepada masyarakat
- Melaksanakan pertemuan dengan para fkub dan ormas di Sulawesi selatan.



Ket. Pemerintah bersinergi dengan tni dan polri dan pemukah agama



Ket. Bakesbangpol melaksanakan Rapat forkopimda Bersama seluruh Kabupaten/Kota



Ket. Bakesbangpol melaksanakan Rapat forkopimda dan forkopimcam Bersama seluruh Aparat desa

3.1.6. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian kinerja	%Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
1.	meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat	100 %	82,24%	17.76%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 82,24% dengan capaian kinerja sebesar 100 % sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 17.76%.

3.1.7. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	Capaian kinerja
1.	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3,127,971,100	Rp. 2,837,374,011	90,71	100 %
2.	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Rp. 463,514,200	Rp. 209,670,208	45,23	100 %

		Kemasyarakatan				
3.	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 1,377,813,300	Rp. 1,302,516,677	94.54	100 %
4.	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 43,160,180,402	Rp. 42,501,054,676	98.47	100 %

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan tabel diatas ada 4 program dan 4 kegiatan penunjang yang meningkatkan sasaran strategis meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% Dalam mencapai target pada sasaran ini, semua program yang ada secara bersama-sama menunjang tercapainya target yang telah ditentukan. Adapun program yang paling berperan dalam pencapaian target sasaran ini adalah program peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, program pemeliharaan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Secara keseluruhan pencapaian sasaran meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat dapat tercapai dengan baik pada tahun 2023 ini. Semua potensi konflik yang ada pada tahun 2023 dapat ditangani dengan baik melalui koordinasi dengan stakeholder terkait terutama Badan Intelijen Daerah, TNI, dan POLRI dan Masyarakat di Sulawesi Selatan.

3.2. Sasaran strategis meningkatnya indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan

3.2.1. Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian 2023
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	71,79	80,09	111,5

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas tahun 2023 badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2023 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan berdasarkan data BPS tercatat sebesar 80,09 yang artinya target tersebut tercapai sebesar 111,5, hal ini bisa tercapai berkat peran semua stecholder dan hasil dari badan kesatuan bangsa dan politik provinsi sulawesi selatan dalam melakukan pendidikan dan sosialisasi politik kepada masyarakat yang sepanjang tahun 2023

3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	Satuan	Target	2023	2022	2019	2020	2021
Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	Angka	71.79	80,09	74,85	70.88	70,58	73,43

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa dan politik menunjukkan bahwa target di atas sebesar 71,79 dengan realisasi 2022 sebesar 74,85 dan realisasi 2023 sebesar 80,09 dan di tahun 2019 70.88 dan di tahun 2020 sebesar 70.58 dan di tahun 2021 73.43 dari tabel ini menunjukkan terdapat peningkatan nilai IDI dari tahun sebelumnya bahkan terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara tahun 2022 dan 2023 ini disebabkan karena terjadi perubahan indikator yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel.

3.2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2023	Tingkat pencapaian
Nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Angka	71,79	80,09	111,5

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra badan kesatuan bangsa dan politik menargetkan nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan sebesar 71,79 akan tetapi sampai dengan akhir 2023 indeks demokrasi indonesia di sulawesi selatan berdasarkan data BPS tercatat sebesar 80,09 dengan ini artinya sulsel sudah melewati target yang di tentukan yang artinya target tersebut tercapai sebesar 111,5.

3.2.4. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Standar Nasional	Capaian
1.	meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	Angka	80,09	80,41	99%

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai dengan tabel diatas Nilai IDI di Sulawesi selatan sebesar 80,09 dibandingkan dengan IDI (Nasional) sebesar 80,41, IDI Sulawesi selatan mendapatkan capaian sebesar 99% itu artinya cukup baik karena di atas 90%.

3.2.5. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Terciptanya koordinasi yang baik dengan semua stakeholder terkait dengan demokrasi antara lain LSM, Partai Politik, Media Cetak, Media Elektornik
- Dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Badan Kesbangpol Kab/Kota
- Tersalurkanya bantuan keuangan parpol sehingga dapat membuat kegiatan Pendidikan politik dan pembinaan kepada masyarakat
- Melaksanakan rapat koordinasi terkait Pendidikan politik



Pj gubernur Bersama badan kesatuan bangsa danpolitik melaksanakan rapat dan peninjauan langsung ke KPU.



Pj Gubernur Sulawesi Selatan Melaksanakan Rapat Koordinasi Bersamaan Kejaksaan, Bawaslu , dan Staff Ahli Kemenpolhukam



Pj Gubernur Sulawesi Selatan Melaksanakan Rapat Koordinasi Bersamaan Penyelenggara Pemilu

3.2.6. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

	Sasaran	% Capaian kinerja	%Penyerapan anggaran	%Tingkat efisiensi
1.	meningkatnya nilai indeks demokrasi di Indonesia Sulawesi selatan.	111,5%	69,73%	30,27 %

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran.

Berdasarkan table diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 69,73% dengan capaian kinerja sebesar 111,5% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 30.27%

3.2.7. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keuangan	Capaian kinerja
1.	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Rp. 230,103,971,449	Rp.160,458,910,564	69,73 %	111,5 %

		Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
--	--	---	--	--	--	--

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Sesuai pada tabel di atas untuk mendukung sasaran pada Indeks Demokrasi Indonesia terdapat 1 program dan 1 Kegiatan yang menunjang untuk terjadinya peningkatan IDI sesuai realisasi keuangan sebesar Rp. 160,458,910,564 atau 69,73%, dengan tingkat capaian kinerja 111,5% sehingga program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran yang diinginkan untuk mencapai target.

3.3. Sasaran strategisMeningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

3.3.1 Analisis capaian Kinerja Analisa Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indicator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2023
Nilai SAKIP OPD	100	75,75	75,75
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100 %	100 %	100 %
Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik	100 %	100 %	100%
Temuan material LHP yang terselesaikan	100 %	100%	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 100 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2023 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2023 mendapat poin 75,75 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 75,75%

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2023 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2023 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%.

Indikator ke 4 yaitu temuan material LHP pada badan kesatuan bangsa dan politik di targetkan sebesar 100% dan sampai akhir 2023 memperoleh target sebesar 100%.

3.3.2 Analisis Capaian Kinerja Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indicator	Satuan	Target	Realisasi				
			2022	2023	2021	2020	2019
1. Nilai SAKIP OPD	Nilai	95	75,00	75,75	74,05	73,38	70,70
2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	90%
3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik		100%	100%	100%	100%	-	-
4. Temuan Material Lhp							

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Berdasarkan table diatas perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir badan kesatuan bangsa Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 100 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2023 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2023 mendapat poin 75,75 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 75,75%. Dan di tahun sebelumnya pada tahun 2022 mendapatkan poin sebesar 75.00 kemudian ditahun 2021 mendapatkan point sebesar 74,05 selanjutnya di tahun 2020 mendapatkan point sebesar 73,38 dan di tahun 2019 mendapatkan point sebesar 70,70 disini kita dapat melihat terjadi peningkatan setiap tahunnya, jadi badan kesatuan bangsa dan politik berhasil meningkatkan nilai sakip setiap tahun.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan akhir Rpjmd/Renstra tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2023 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% dan di tahun 2022 sebesar 100% dan ditahun 2021 mendapatkan sebesar 100% selanjutnya di tahun 2020 mendapatkan sebesar 100% dan di tahun 2019 mendapatkan sebesar 90%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2023 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100% dan di tahun 2022 sebesar 100% dan ditahun 2021 sebesar 100% kemudian di tahun 2020 sebesar 100% dan ditahun 2019 mendapatkan sebesar 95%

Sedangkan pada indicator ke 4 yaitu temuan material lhp yang ditargetkan pada akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2023 temuan material Lhp pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mencapai target sebesar 100% dan ditahun 2022 sebesar 100% dan ditahun 2021 sebesar 100 % dan di tahun 2019 sampai dengan 2020 belum adanya indicator yang ditambahkan oleh mentor menpan rb pada saat itu.

3.3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indicator kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2022	Tingkat pencapaian
Nilai SAKIP OPD	Nilai	100	75,75	75,75
Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	Persentase	100%	100 %	100 %
Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik	Persentase	100%	100%	100%
Temuan material LHP yang terselesaikan	persentase	100%	100%	100%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas akhir rpjmd/renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menargetkan mendapat poin 100 untuk Nilai sakip Opd akan tetapi sampai dengan akhir 2023 hasil evaluasi inspektorat provinsi Sulawesi selatan terhadap Sakip Bakesbangpol tahun 2022 mendapat poin 75,75 ini artinya badan kesatuan bangsa politik berhasil mencapai target sebesar 75,75%.

Sedangkan untuk indikator ke 2 yaitu Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) ditargetkan akhir Rpjmd/Renstra tercapai sebesar 100% dan sampai dengan akhir 2023 seluruh capaian kinerja berhasil terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100%.

Sedangkan untuk indikator ke 3 yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori baik pada badan kesatuan bangsa dan politik yang di targetkan akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2023 Asn Berkategori Baik sebesar 100% yang artinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil mencapai target sebesar 100%.

Sedangkan pada indikator ke 4 yaitu temuan material lhp yang ditargetkan pada akhir Rpjmd/Renstra sebesar 100% dan sampai akhir 2023 temuan material Lhp pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mencapai target sebesar 100%.

3.3.4. Analisis Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Indicator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Standar Nasional	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1. Nilai SAKIP OPD 2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan 3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik 4. Temuan Material Lhp yang terselesaikan	Persentase	75,75 100 100 100		

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai dengan table diatas Realisasi kinerja sasaran ini belum bisa dibandingkan dengan standar nasional, hal ini disebabkan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada standar nasional maupun SPM, sehingga belum dapat dibandingkan.

3.3.5. Analisa Faktor Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi

Factor pendukung yang menyebabkan keberhasilan sebagai berikut:

- Sarana dan Prasarana, Penerapan penilaian kinerja kehadiran dengan Berbasis IT (e-rkbmd, e-planning, e-budgeting) serta pelaporan kinerja yang tepat waktu.
- Dukungan dari ASN Bakesbangpol untuk meningkatkan kinerja sangat baik dalam peningkatan disiplin.
- Dengan adanya sosialisasi terkait peningkatan ASN dalam menyusun SKP di Badan Kesatuan Bangsa dan politik dan melakukan kolaborasi dengan BKD



3.3.6. Analisis Capaian Kinerja atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	%Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	100	81,24	18,76%

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Keterangan :

Jika %capaian Kinerja<100% maka % capaian kinerja-%penyerapan anggaran

Jika% capaian kinerja>= 100% maka 100% - %penyerapan anggaran

Berdasarkan tabel diatas Badan kesatuan bangsa dan politik mendapatkan penyerapan anggaran sebesar 81,24 % dengan capaian kinerja sebesar 100% sehingga tingkat efisiensi pada Bakesbangpol mendapatkan persentase sebesar 18,76%.

3.3.7. Analisa Program/ Kegiatan dalam pencapaian kinerja

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	% keungan	% capaian
1.	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 12,836,042,162	Rp. 10,428,439,318	81,24 %	100 %

Sumber Data : Data Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sul-Sel

Sesuai pada tabel realisasi keuangan di atas untuk mendukung sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah terdapat 1 program dan 8 kegiatan untuk mendukung tercapainya suatu target yang ingin dicapai sesuai pada table di atas kita dapat melihat persentase keuangan sebesar 81,24 dan tingkat capaian kinerja pada table diatas menunjukkan persentase capaian sebesar 100%.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2019-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel, maka pada tahun anggaran 2023 telah dialokasikan anggaran dari dana APBD Prov. Sulsel dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 291.069.492.613 dengan realisasi sebesar Rp. 217.737.965.454 (74.81%), Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut : Rincian Anggaran Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang jasa dan Belanja Hibah kemudian Belanja Modal terdiri dari : Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebelum dan setelah perubahan. Selanjutnya, terdapat DPPA untuk Belanja Daerah sehingga rincian anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel berubah menjadi :

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
Belanja Daerah	53.236.563.214	290.563.226.113	237.326.662.899	545%
Belanja Operasi	53.236.563.214	290.563.226.113	237.326.662.899	545%
Belanja Modal	369.556.000	506.266.500	136.710.500	136%

Belanja Daerah berupa belanja operasi dan belanja modal dengan alokasi satu tahun anggaran dan telah teralisasi **Rp 217.737.965.454,-** atau **74.81 %** dari jumlah alokasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 291.069.492.613**

Dibandingkan dengan tahun 2022 capaian realisasi keuangan sebesar Rp. **63,907,517,662,-** atau **97.37 %** maka tahun ini terjadi Penurunan realisasi capaian keuangan dikarenakan Adanya anggaran Hibah Yang belum terealisasi Pada dokumen anggaran perubahan pada badan kesatuan bangsa dan politik Selengkapnya realisasi keuangan dan fisik disajikan sebagai berikut;

REALISASI KEMAJUAN BELANJA APBD PROVINSI SULAWESI SELATAN
S/D BULAN: DESEMBER
TAHUN: 2023

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
									KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
					TOLAK UKUR				TARGET	(Rp)			
8.01.0.00.0. 00.25.0000				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			291.069.492.613,0	2.87	217.737.965.454,0	74.81		99.96	73.331.527.159,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100 % 100 % 100 %	12.836.042.162,0	4.41	10.428.439.318,0	81.24	100.00 100.00 100.00	99.10	2.407.602.844,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah Tepat Waktu	20 %	263.613.124,0	2.05	210.951.726,0	80.02	20.00	100.00	52.661.398,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	209.980.200,0	79.65	169.431.002,0	80.69	3.00	100.00	40.549.198,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	jumlah dokumen RKASKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.033.600,0	0.39			1.00	100.00	1.033.600,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9.901.500,0	3.76	6.000.000,0	60.60	1.00	100.00	3.901.500,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.901.500,0	2.24	3.658.000,0	61.98	1.00	100.00	2.243.500,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah dokumen perubahan DPASKPD	1 dokumen	3.900.000,0	1.48			1.00	100.00	3.900.000,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinea SKPD	21 Laporan	31.862.724,0	12.09	31.862.724,0	100.00	21.00	100.00	0,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.033.600,0	0.39			1.00	100.00	1.033.600,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusnan Dokumen laporan Keauangan Tepat Waktu	20 %	6.398.860.224,0	49.85	6.248.846.081,0	97.66	20.00	100.00	150.014.143,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.119.193.576,0	95.63	6.016.108.876,0	98.32	600.00	100.00	103.084.700,0

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
									KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
					TOLAK UKUR				TARGET	(Rp)			
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaaan dan PengujianVerii-kasi Keuangan SKPD	12 dokumen	40.600.900,0	0.63	29.935.368,0	73.73	12.00	100.00	10.665.532,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 laporan	62.503.000,0	0.98	36.420.933,0	58.27	12.00	100.00	26.082.067,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	3.843.600,0	0.06	3.308.648,0	86.08	1.00	100.00	534.952,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	5.417.100,0	0.08	1.704.615,0	31.47	1.00	100.00	3.712.485,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	157.644.248,0	2.46	152.715.641,0	96.87	12.00	100.00	4.928.607,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	9.657.800,0	0.15	8.652.000,0	89.59	1.00	100.00	1.005.800,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah persentase administrasi barang milik daerah yang terdata dengan baik	20 %	52.963.000,0	0.41	29.958.180,0	56.56	20.00	100.00	23.004.820,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Dokumen Rencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	32.785.000,0	61.90	16.896.180,0	51.54	1.00	100.00	15.888.820,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.178.000,0	38.10	13.062.000,0	64.73	1.00	100.00	7.116.000,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Prilaku Pegawai Prangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja	20 %	554.802.648,0	4.32	200.799.218,0	36.19	20.00	96.08	354.003.430,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	1 Paket	87.050.000,0	15.69	27.019.620,0	31.04	1.00	75.00	60.030.380,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	58.531.324,0	10.55	39.615.474,0	67.68	12.00	100.00	18.915.850,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	409.221.324,0	73.76	134.164.124,0	32.79	12.00	100.00	275.057.200,0

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
									KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
					TOLAK UKUR				TARGET	(Rp)			
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	1 Orang					0.00		
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Kantor	20 %	3.975.367.624,0	30.97	2.874.071.501,0	72.30	20.00	100.00	1.101.296.123,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0 Paket	40.222.800,0	1.01	14.187.600,0	35.27	1.00	100.00	26.035.200,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	220.405.600,0	5.54	38.811.263,0	17.61	1.00	100.00	181.594.337,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 Paket	19.801.000,0	0.50	9.333.840,0	47.14	1.00	100.00	10.467.160,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Kunjungan Tamu	1 Laporan	216.975.300,0	5.46	87.623.493,0	40.38	1.00	100.00	129.351.807,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.443.356.600,0	86.62	2.692.252.581,0	78.19	1.00	100.00	751.104.019,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	34.606.324,0	0.87	31.862.724,0	92.07	12.00	100.00	2.743.600,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 %	506.266.500,0	3.94	199.511.900,0	39.41	20.00	83.08	306.754.600,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	163.648.000,0	32.32	142.968.000,0	87.36	1.00	100.00	20.680.000,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	29 unit	342.618.500,0	67.68	56.543.900,0	16.50	27.00	75.00	286.074.600,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20 %	461.090.942,0	3.59	393.166.116,0	85.27	20.00	100.00	67.924.826,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	461.090.942,0	100.00	393.166.116,0	85.27	12.00	100.00	67.924.826,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	20 %	623.078.100,0	4.85	271.134.596,0	43.52	20.00	98.66	351.943.504,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23 unit	412.255.000,0	66.16	264.381.596,0	64.13	23.00	100.00	147.873.404,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	2 unit	8.323.100,0	1.34			0.00		8.323.100,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	55.000.000,0	8.83	6.753.000,0	12.28	10.00	100.00	48.247.000,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	147.500.000,0	23.67			1.00	100.00	147.500.000,0

KODE ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
									KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
					TOLAK UKUR				TARGET	(Rp)			
8.01.0.00.0. 00.25.0000	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	20 %	3.127.971.100,0	1.07	2.837.374.011,0	90.71	20.00	100.00	290.597.089,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Gerakan Bela Negara	500 Orang	3.127.971.100,0	100.00	2.837.374.011,0	90.71	500.00	100.00	290.597.089,0
					jumlah laporan pemantapan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah	4 Laporan					4.00		
					jumlah laporan forum pembauran kebangsaan (FPK)	4 Laporan					4.00		
					jumlah laporan pembinaan ideologi, karakter, dan wasbang	4 Laporan					4.00		
8.01.0.00.0. 00.25.0000	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	6 dokumen	244.194.900,0	7.81	31.021.560,0	12.70	6.00	100.00	213.173.340,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 laporan	1.134.435.000,0	36.27	1.118.738.000,0	98.62	1.00	100.00	15.697.000,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 Orang	1.749.341.200,0	55.93	1.687.614.451,0	96.47	8.00	100.00	61.726.749,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	82.02 %	230.103.971.449,0	79.05	160.458.910.564,0	69.73	83.39	100.00	69.645.060.885,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik di Sulsel	2 Dokumen	230.103.971.449,0	100.00	160.458.910.564,0	69.73	2.00	100.00	69.645.060.885,0
					Jumlah Pertemuan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia	1 Kali					1.00		
					Jumlah Laporan Bantuan Keuangan Parpol	1 Laporan					1.00		
					Jumlah Peserta Pendidikan Politik Masyarakat	100 Orang					150.00		
8.01.0.00.0. 00.25.0000	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitati Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 dokumen	5.507.500,0	0.00	5.507.500,0	100.00	1.00	100.00	0,0
					jumlah dokumen penyusunan program kerja di bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitati Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 dokumen					1.00		

KODE ORGANISASI/ PROGRRAM/ KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
									KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
					TOLAK UKUR	TARGET			(Rp)	(%)			
8.01.0.00.0. 00.25.0000	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan UmumPemilihan Umum Kepala Daerah Serta jumlah laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik	6 laporan 7 laporan	314.770.188,0	0.14	225.342.343,0	71.59	6.00 7.00	100.00	89.427.845,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	100 Orang 100 Orang	229.535.933.261,0	99.75	160.026.948.551,0	69.72	100.00 100.00	100.00	69.508.984.710,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Polittik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Orang 3 Orang	51.679.100,0	0.02	25.642.000,0	49.62	3.00 3.00	100.00	26.037.100,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 laporan 1 laporan	196.081.400,0	0.09	175.470.170,0	89.49	1.00 1.00	100.00	20.611.230,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi 4 konsensus kebangsaan	20 %	463.514.200,0	0.16	209.670.208,0	45.23	20.00	100.00	253.843.992,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Usulan Surat Keterangan Terdaftar yang Dikelola	4 SKT	463.514.200,0	100.00	209.670.208,0	45.23	4.00	100.00	253.843.992,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	369.405.600,0	79.70	125.091.476,0	33.86	1.00	100.00	244.314.124,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	34.972.600,0	7.55	32.157.850,0	91.95	200.00	100.00	2.814.750,0

KODE ORGANISASI/ PROGRRA/ KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
									KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
					TOLAK UKUR	TARGET			(Rp)	(%)			
8.01.0.00.0. 00.25.0000	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Orang	23.567.000,0	5.08	18.410.082,0	78.12	1.00	100.00	5.156.918,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	35.569.000,0	7.67	34.010.800,0	95.62	1.00	100.00	1.558.200,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas) Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	20 % 100 %	1.377.813.300,0	0.47	1.302.516.677,0	94.54	20.00 100.00	100.00	75.296.623,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah laporan pemetaan potensi kerawanan terhadap kerukunan umat beragama dan multi etnis Jumlah Laporan Satgas Kontra terorisme, radikalisme dan narkoba Jumlah laporan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi daerah Jumlah Peserta Dialog publik peningkatan ketahanan lembaga usaha ekonomi kab/kota	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 Orang	1.377.813.300,0	100.00	1.302.516.677,0	94.54	4.00 4.00 4.00 4.00 100.00	100.00	75.296.623,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 dokumen	58.044.500,0	4.21	56.042.303,0	96.55	4.00	100.00	2.002.197,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	1.235.626.600,0	89.68	1.181.701.645,0	95.64	200.00	100.00	53.924.955,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	47.134.000,0	3.42	35.258.329,0	74.80	200.00	100.00	11.875.671,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	37.008.200,0	2.69	29.514.400,0	79.75	3.00	100.00	7.493.800,0

KODE ORGANISASI/ PROGRRAM/ KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
									KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
					TOLAK UKUR	TARGET			(Rp)	(%)			
8.01.0.00.0. 00.25.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			Persentase Penurunan jumlah konflik di lingkungan masyarakat	20 %			43.160.180.402,0	14.83	42.501.054.676,0
8.01.0.00.0. 00.25.0000	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 kali	43.160.180.402,0	100.00	42.501.054.676,0	98.47	12.00	100.00	659.125.726,0
				Jumlah Laporan Antisipasi Potensi Ancaman Bangsa	12 Laporan	12.00							
				Jumlah peserta rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah	100 Orang	100.00							
				Jumlah Laporan Forum Kewaspadaan Dini Daerah Prov. Sulsel	4 Laporan	4.00							
				Jumlah Objek yang membutuhkan pengamanan	4 Laporan	4.00							
				Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian unjuk rasa	12 Laporan	12.00							
				Jumlah Laporan Pemantauan dan pengendalian Trantibmas	4 Laporan	4.00							
				Jumlah Laporan Koordinasi Tiga Pilar Bangdes Mantra	4 Laporan	4.00							
				Jumlah Laporan Pengawasan dan pemantauan Orang Asing NGO dan lembaga asing	4 Laporan	4.00							
				Jumlah Dokumen Pemetaan Konflik Wilayah	2 Dokumen	2.00							
8.01.0.00.0. 00.25.0000	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	1.572.000,0	0.00	1.394.000,0	88.68	1.00	100.00	178.000,0
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	1.00							
8.01.0.00.0. 00.25.0000	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	6 dokumen	1.572.000,0	0.00	1.394.000,0	88.68	6.00	100.00	178.000,0
				Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	6 dokumen	6.00							

KODE ORGANISASI/ PROGRRAM/ KEGIATAN				NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER				SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
									KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
					TOLAK UKUR				TARGET	(Rp)		(%)	
8.01.0.00.0. 00.25.0000	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang	150 Orang	42.008.006.002,0	97.33	41.616.291.501,0	99.07	150.00	100.00	391.714.501,0
					Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang	150 Orang					150.00		
8.01.0.00.0. 00.25.0000	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi ddi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Orang	79.426.000,0	0.18	56.381.175,0	70.99	4.00	100.00	23.044.825,0
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi ddi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Orang					4.00		
8.01.0.00.0. 00.25.0000	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	43 laporan	142.354.400,0	0.33	131.586.000,0	92.44	43.00	100.00	10.768.400,0
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 laporan					50.00		
8.01.0.00.0. 00.25.0000	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	6 dokumen	927.250.000,0	2.15	694.008.000,0	74.85	6.00	100.00	233.242.000,0
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	6 dokumen					6.00		

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN	NILAI
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase potensi konflik yang tertangani	100%	Sangat Memuaskan
2.	meningkatnya nilai indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi selatan	Nilai indeks demokrasi di Sulawesi selatan	111,5	Sangat Memuaskan
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1. Nilai SAKIP OPD 2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen (Perencanaan) 3. Persentase ASN Nilai SKP Kategori terbaik 4. Temuan Material Lhp	75,75 % 100% 100% 100%	Sangat Baik Sangat Memuaskan Sangat Memuaskan Sangat Memuaskan
Rata-Rata			87,35	Sangat Baik

Pada tahun 2023 dapat digambarkan berdasarkan table diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil evaluasi 7 analisis di bab sebelumnya telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target capaian dengan tingkat rata-rata keberhasilan sebesar **87,35%** dan badan kesatuan bangsa dan politik juga telah berhasil melakukan efisiensi dengan tingkat rata-rata keberhasilan sebesar **8,73%**.

B. Permasalahan dan Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

- Keberhasilan indikator kinerja sasaran bergantung pada pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Prov. Sulsel yang dipengaruhi oleh kuatnya koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder/mitra kerja Bakesbangpol dalam pelaksanaan tupoksi.
- Ketersediaan sumber daya baik kuantitas maupun kualitas masih menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Terbatasnya ruang pendanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Prov. Sulsel sehingga dalam pelaksanaannya alokasi yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel pada akhir tahun anggaran dapat melampaui pagu tahun berkenaan dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dihadapkan pada kondisi yang sangat dinamis terutama stabilitas politik dan keamanan.
- Masih lemahnya pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala.
- Dari kualitas sumber daya aparatur Bakesbangpol Prov. Sulsel diperlukan penyamaan persepsi dalam pemahaman pencapaian kinerja sehingga hasil maupun kinerja yang dicapai memiliki kualitas yang diandalkan.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sulsel melakukan langkah-langkah demi meminimalisir kendala kendala yang ada, sebagai berikut :

1. Bimtek dan rapat koordinasi internal untuk peningkatan kompetensi SDM Badan Kesbangpol.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait seperti FKUB, FKDM dan FPK.
3. Meningkatkan fungsi keberadaan website Kesbangpol dalam menyajikan data-data yang dimiliki dengan koordinasi secara intensif dengan seksi-seksi.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol.
5. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk membangun kesamaan dan kesatuan data dengan sumber atau penyedia data, baik OPD di lingkungan Pemerintah Kota Depok maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, antara lain Kepolisian, TNI, Kejari, Kejati, Imigrasi, Depag, Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Dirjen Pemerintahan Umum dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang dapat Kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadikan informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Makassar, Februari 2024
Pit KEPALA BADAN KESBANGPOL



ANSYAR, S.STP., M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19791205 199810 1 002

